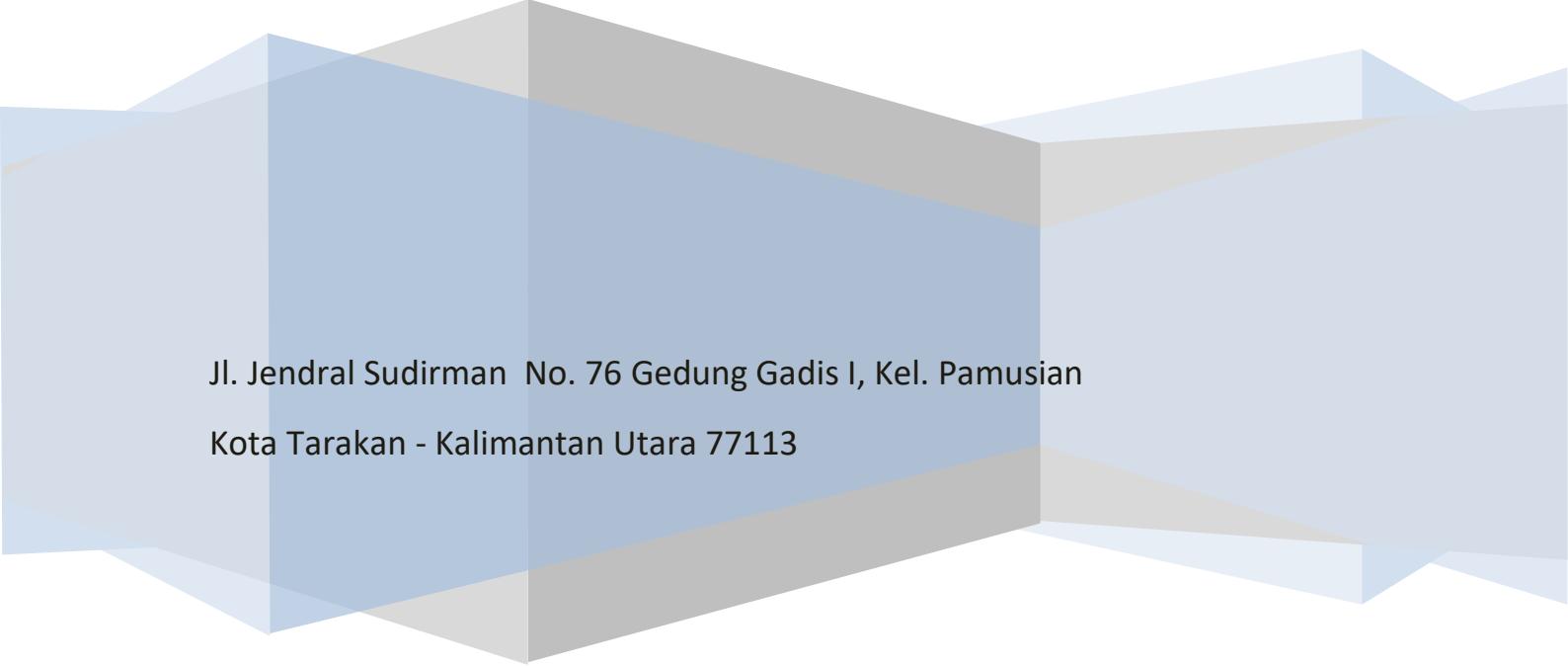


**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**RENCANA STRATEGIS**

**Tahun 2025-2029**



Jl. Jendral Sudirman No. 76 Gedung Gadis I, Kel. Pamusian  
Kota Tarakan - Kalimantan Utara 77113



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA**

**BERENCANA**

**Tahun 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

## KATA PENGANTAR



## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunianya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025-2029 ini selesai disusun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Rencana Strategis yang memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu dua tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Dokumen Rencana Strategis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Kota Tarakan Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi informasi publik, mitra kerja dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana..

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra dan dukungan instansi lain. Semoga Rencana Strategis ini memberikan penjelasan yang memadai dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tarakan, 20 September 2025  
Kepala Dinas,

**Hasman Parigi, S.E., M.M**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19720822 2010011 001

*DAFTAR ISI*



## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar & Grafik	vi
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	14
2.1. Gambaran Pelayanan DP3APPKB	14
2.2. Sumber Daya DP3APPKB	22
2.3. Kinerja Pelayanan DP3APPKB	25
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan DP3APPKB	41
2.5. Mitra DP3APPKB dalam memberika Pelayanan	43
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis DP3APPKB	44
3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	54
3.1. Tujuan dan Sasaran DP3APPKB	55
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	60
4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	65
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	153
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	154
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	156
5. Penutup	159
Lampiran	

## *DAFTAR TABEL*



## Daftar Tabel

Tabel 2.2.1.1	Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per 23 September Tahun 2025.	22
Tabel 2.2.1.2	Analisa kebutuhan ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025	23
Tabel 2.2.2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per September 2025.	24
Tabel 2.3.1.1	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)	26
Tabel 2.3.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	34
Tabel 2.3.3.2	Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan Program Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	35
Tabel 2.4.2.1	Mitra dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	44
Tabel 2.4.3.1	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	45
Tabel 2.5.1.1	Rumusan Masalah Rendahnya Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	45
Tabel 2.5.2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2025-2029 Kota Tarakan	50
Tabel 2.5.2.2	Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029 Kota Tarakan	53
Tabel 3.1.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	59

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan		
Tabel. 3.2.1.1	Tahapan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025-2029	63
Tabel. 3.2.2.1	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025-2029	64
Tabel 4.1.1	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029	68
Tabel 4.1.2.	Rencana Pemdaanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029	91
Tabel 4.1.3.	Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029	149
Tabel 4.2.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029	157
Tabel 4.2.2.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029	159

*DAFTAR GAMBAR &  
GRAFIK*



## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6
Gambar 1.2	Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)	6

## Daftar Grafik

Grafik 2.3.1	IKU Kategori Pemberdayaan Gender dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	30
Grafik 2.3.2	IKU Kategori Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	31
Grafik 2.3.3	IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	32
Grafik 2.3.4	IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024	32

## I. PENDAHULUAN



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Laut dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera. Visi ini sejalan dengan peran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan dan anak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Tarakan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan

mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan.

Untuk merealisasikan capaian kinerja dari rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan serta program

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Pemerintah Daerah; (5) Penyusunan Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

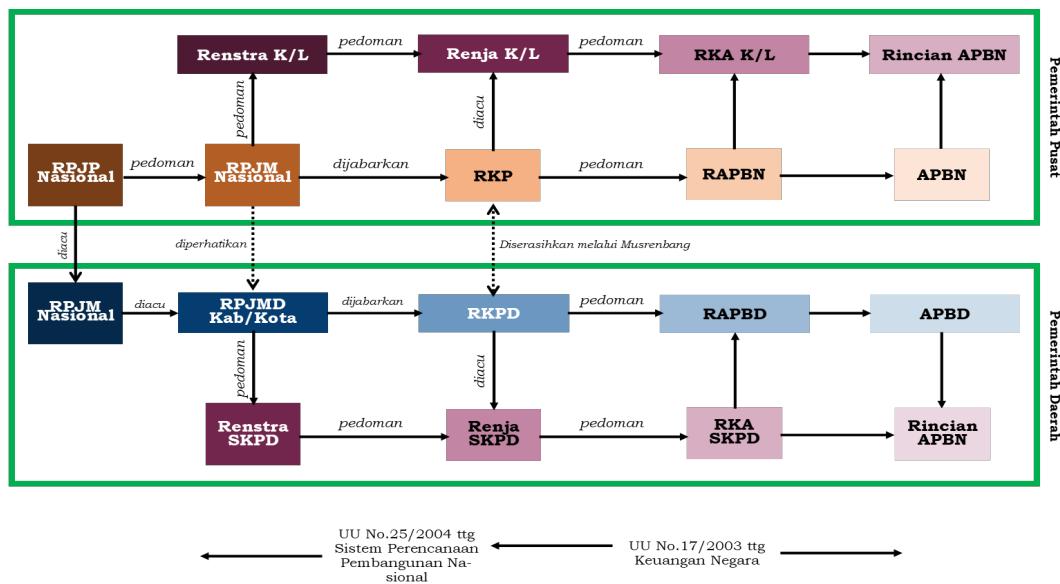
Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan tentang Tugas dan Fungsi DPPAPPKB, RPJMD Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu dua tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

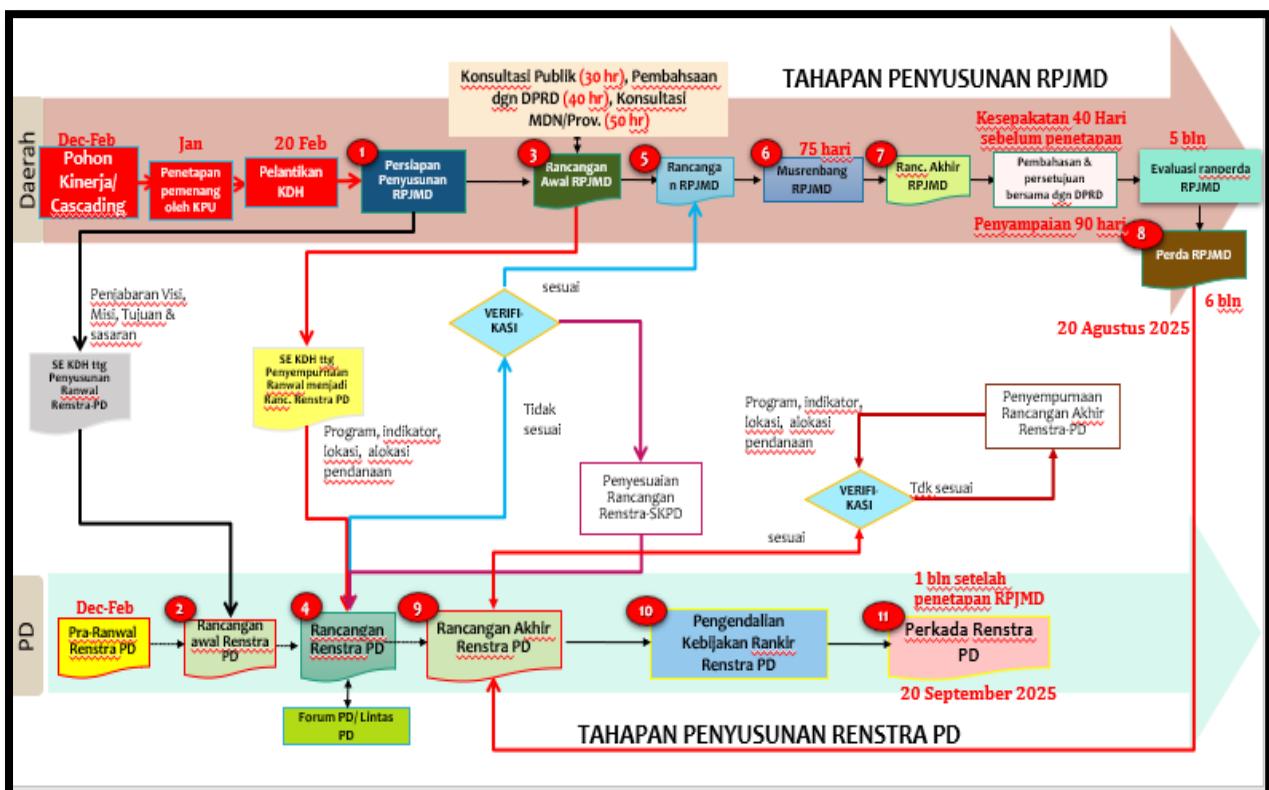
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

Gambar 1.1  
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

---

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah Perubahan Rencana Strategis DPPPAPPKB 2019-2024 5 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

33. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
34. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/214/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun anggaran 2025 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tolak ukur kinerja selama lima tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menyajikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan
4. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025 - 2029 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.
5. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas seusai dengan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

7. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 2 (dua) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Stretegis DP3APPKB**

- 2.1 Gambaran Pelayanan DP3APPKB
- 2.2 Sumber daya DP3APPKB
- 2.3 Kinerja Pelayanan DP3APPKB
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan DP3APPKB
- 2.5 Permasalahan dan Strategis

2.6 Identifikasi Permasalahan

2.7 Isu Strategis

**Bab III. Tujuan, Sasaran, Stretegi dan Arah Kebijakan DP3APPKB**

3.1 Tujuan dan Sasaran DP3APPKB

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB

**Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas daerah

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3APPKB

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB

4.5. Target kinerja urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**Bab V. Penutup**

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

*II. GAMBARAN PELAYANAN,  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA*



## 2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 2.1.1. *Tugas Pokok*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### 2.1.2. *Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

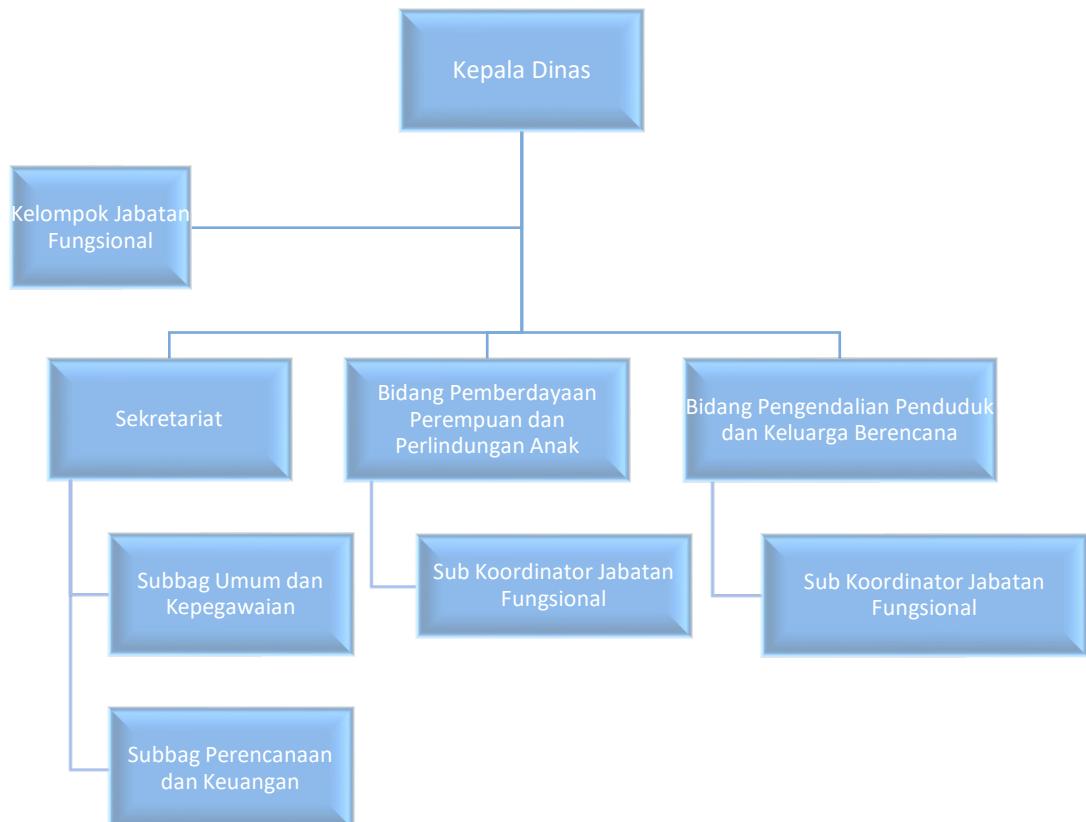
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### *2.1.3 Struktur Organisasi*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



## 1. Kepala Dinas

### a. Tugas

1. Memimpin merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai ruang lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### a. Tugas

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

### b. Fungsi

1. Koordinasi kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1. Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana di bawah kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
3. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah.
4. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
5. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
6. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah ;
7. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
8. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
10. Pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;

11. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah;
12. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
13. Pelaksanaan upaya pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
14. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
15. Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
16. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
17. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
18. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana dibawah Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

##### a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### b. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah di Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
7. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah ;
8. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
9. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Kelompok

Jabatan Fungsional di bawah koordinasi Kepala Bidang bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1 *Sumber Daya (Manusia)*

Berdasarkan data kepegawaian per 23 September 2025 jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 25 orang yang terdiri dari ASN 21 orang dan tenaga kontrak sebanyak 4 orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1  
Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per Tahun 2025.

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pegawai			
a. PNS	8	13	21
b. Honor Kontrak	3	1	4
Jumlah	11	14	25
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :			
a. Golongan IV	2	2	4
b. Golongan III	6	11	17
c. Golongan II			
d. Golongan I			
Jumlah	8	13	21
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan:			
a. Kepala Dinas	1		1
b. Sekretaris		1	1
c. Administrator		1	1
d. Kapala Sub Bagian	1	1	2
e. Jabatan Fungsional Tertentu	1	2	3
Jumlah	4	8	12
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan:			
a. S2	2	1	3
b. S1	4	13	17
c. D3	2		2
d. SMA			
e. SMP			

Jumlah	8	14	22
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan:			
a. Spamen			
b. Spama/Diklat PIM III	1		1
c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	2	4
Jumlah	3	2	5

Sumber: Data Kepegawaian DP3APPKB Kota Tarakan 2025

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 38 orang, namun pegawai ASN yang ada 25 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 31 orang atau 83,78%.

**Tabel 2.2.1.2**  
**Analisa kebutuhan ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025**

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-
2.	Sekretariat	7	10	-	3
3.	Bidang PPA	7	11	-	4
4.	Bidang KB	6	12	-	4
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	2	-	2

Sumber: Data Kepegawaian DP3APPKB Kota Tarakan 2025

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor.

Jumlah jenis sarana dan prasarana berdasarkan kondisinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.1

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per 2025.

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
	Baik	Rusak	
Mobil Dinas	6 buah	0	6 buah
Sepeda Motor	13 buah	3 rusak	16 buah
Lemari Besi	17 buah	0	17 buah
Lemari Kaca	5 buah	0	5 buah
Lemari Kayu	1 buah	0	1 buah
Rak Kayu	2 buah	0	2 buah
Kursi lipat	213 buah	9 rusak	204 buah
Kursi putar	3 buah	5 buah	8 buah
Meja 1/2 Biro	32 buah	0 buah	32 buah
Meja Komputer	3 buah	4 buah	7 buah
AC Split	7 buah	0	7 buah
Telivisi	2 buah	0	2 buah
Note book	12 buah	6 buah	18 buah
Printer	10 buah	0	10 buah
Server	1 buah	0	1 buah
Kursi kerja eselon	18 buah	4 buah	22 buah
UPS	5 buah	0	5 buah
Personal Computer	5 buah	4 buah	9 buah
Proyektor + peralatan	9 buah	8 rusak	1 buah
Layar	3 buah	2 buah	1 buah
Handycam	2 buah	0	2 buah
Mesin Ketik Manual	3 buah	0	3 buah
Wireless Amplifier	1 buah	0	1 buah
Lemari makan	1 buah	0	1 buah
Faxsimile	1 buah	0	1 buah
Spring balance	2 buah	0	2 buah
Lemari pakaian	1 buah	0	1 buah
Kompor gas	1 buah	0	1 buah
Mesin potong rumput	1 buah	0	1 buah
Generator	1 buah	0	1 buah
Kamera	2 buah	0	2 buah
Trolley Car/Lori	4 buah	0	4 buah
Rak besi	10 buah	0	10 buah
Filling Cabinet	6 buah	0	6 buah
Kursi biasa	18 buah	0	18 buah
Kursi tamu	3 buah	0	3 buah

Sumber : Laporan Aset DP3APPKB Kota Tarakan Tahun September 2025

## 2.3. Kinerja Perangkat Daerah

### 2.3.1 *Capaian Kinerja Tahun 2020-2024*

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah.

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

Tabel.2.3.1.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	IPG			✓	91,90	92,00	92,10	92,29	92,30	86,67	87,30	87,85	88,46	89,04	94,31	94,89	95,39	95,85	96,47
2	IDG			✓	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	59,72	58,92	59,15	58,86	67,83	100,00	98,64	98,70	97,89	112,43
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	2,63	6,63	9,69	0,21	0,37	176	166	175
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	0,10	0,40	1,78	0,21	0,37	0,54	2,33	14,26
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)			✓	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	69,22	58,20	57,40	51,04	56,80	109,65	92,16	89,48	78,34	85,87
6	Nilai SAKIP			✓	65,82	68,00	70,00	71,00	72,00	61,11	70,30	77,79	70,06	85,87	92,84	103,38	111,13	98,68	119,26
7	Cakupan PUG yang aktif			✓	10,00	23,33	33,33	43,33	53,33	n.a	23,33	n.a	96,67	100,00	n.a	100,00	n.a	223,10	187,51

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			✓	n.a	10,00	10,00	11,00	12,00	n.a	15,04	53,72	30,51	21,84	n.a	n.a	537,20	277,36	182,00
9	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak			✓	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	10,00	0,20	0,20	35,00	35,00	33,33	0,67	0,67	100,00	100,00
11	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase pemenuhan indikator KLA			✓	n.a	20,83	33,33	50,00	62,50	n.a	n.a	50,00	58,00	62,50	n.a	n.a	150,02	116,00	100,00
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait			✓	n.a	0,02	0,02	0,02	0,02	n.a	35,00	2,60	0,04	n.a	n.a	152.173,91	11.818,18	185,71	n.a

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

14	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Persentase keluarga yang terdata			✓	4,00	8,88	17,77	26,65	35,53	4,00	91,92	75,31	100,00	100,00	100,00	1.035,14	423,80	375,23	281,45
16	TFR (Angka Kelahiran Total)			✓	2,30	2,29	2,28	2,25	2,24	2,30	2,07	2,24	2,28	2,27	100,00	90,39	98,03	101,33	101,34
17	Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun			✓	-	25,00	25,00	25,00	25,00	n.a	n.a	21,26	22,06	22,20	n.a	n.a	85,04	88,24	88,80
18	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			✓	25,98	63,15	64,15	65,15	66,15	n.a	n.a	31,30	22,25	26,30	n.a	n.a	48,79	34,15	39,76
19	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)			✓	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	n.a	n.a	20,53	15,25	14,60	n.a	n.a	84,66	63,54	62,13

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

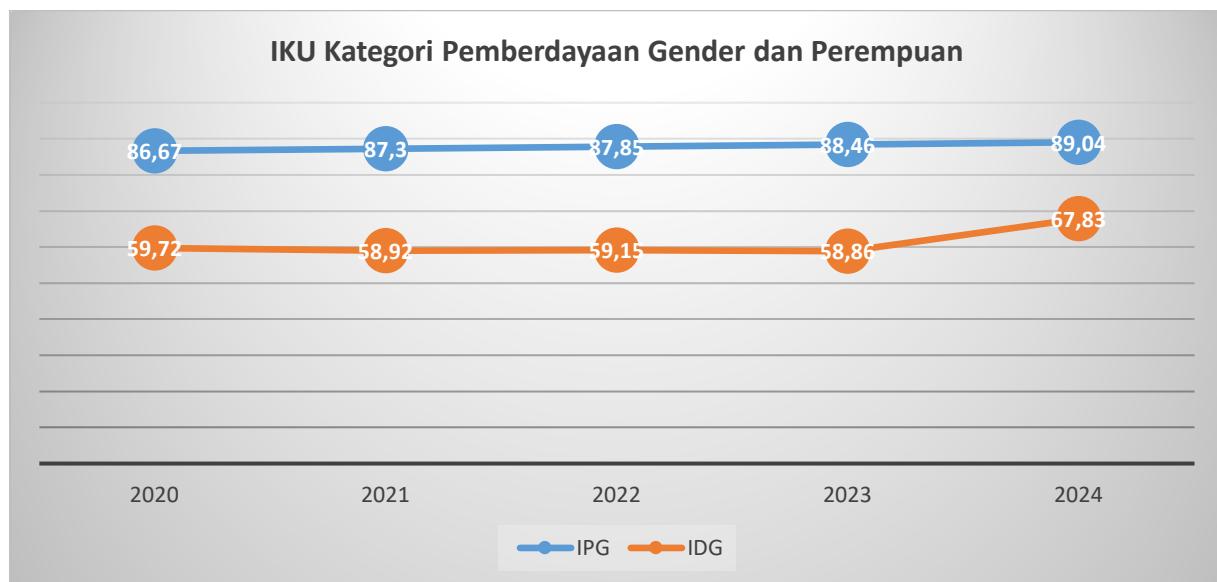
20	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)			✓	n.a	50,00	55,00	60,00	65,00	100,00	99,38	99,38	81,58	87,00	n.a	198,76	180,69	135,97	133,85
21	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengalami peningkatan dan penurunan yang dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik 2.3.1

IKU Kategori Pemberdayaan Gender dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun pada Indeks Pemberdayaan Gender adanya penurunan trend dari tahun 2020 hingga 2023 dan naik tajam di tahun 2024. Hal ini didukung oleh jumlah perwakilan Perempuan di parlemen daerah yang meningkat.

Grafik 2.3.2

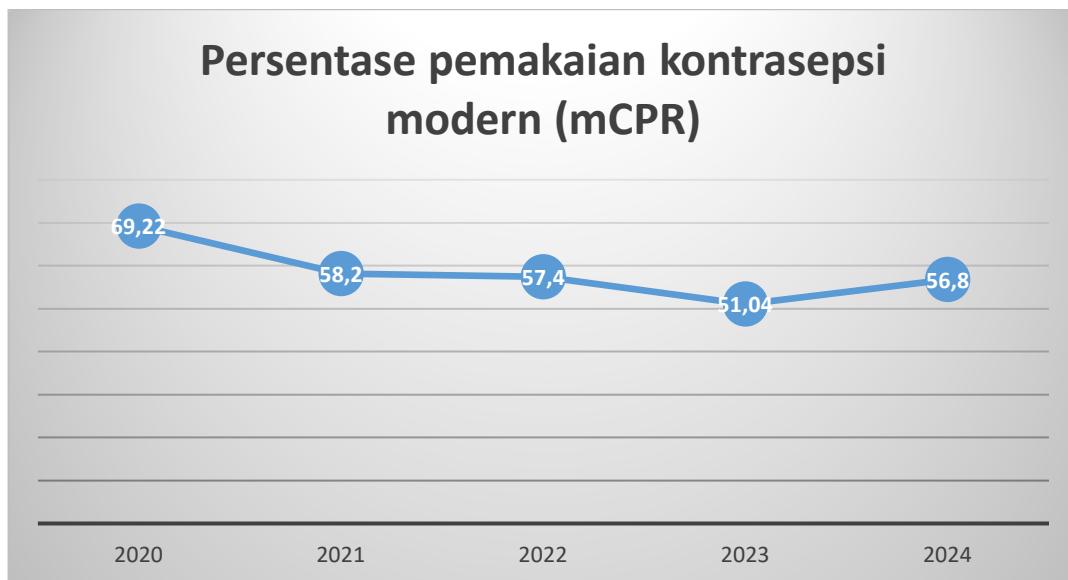
IKU Kategori Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu meningkat begitu juga pada kasus anak. Hal ini dikarenakan masifnya kegiatan pencegahan dan sosialisasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak sehingga masyarakat berani *speak up* tentang kasus perempuan dan anak. Selain itu aktifnya peran forum anak daerah dan adanya tim pencegahan kekerasan anak di sekolah.

Grafik 2.3.3

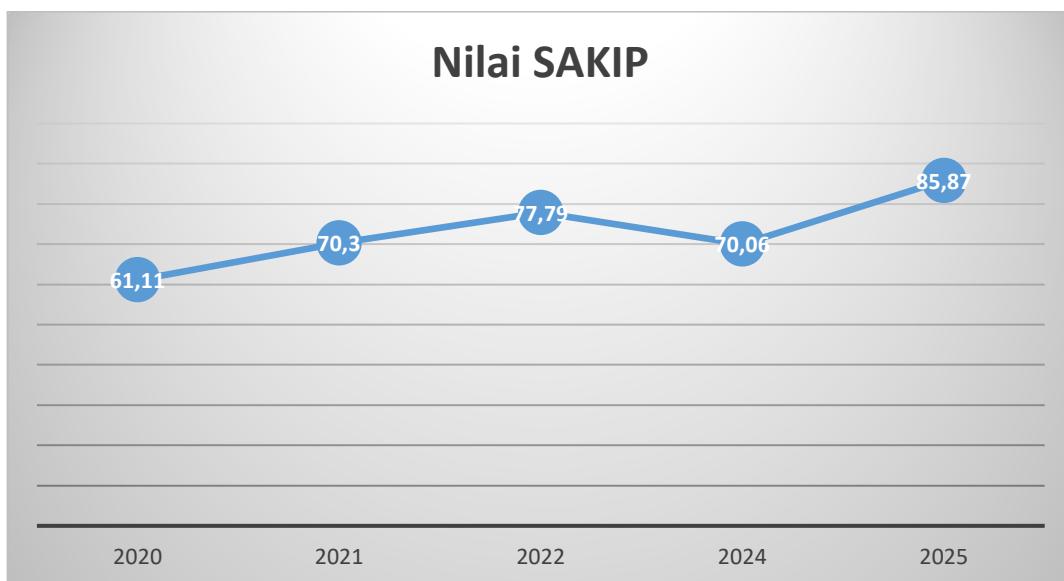
IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu menurun dari target yang ditetapkan. Ini mengisyaratkan perlunya intervensi strategis memperkuat partisipasi pemakaian kontrasepsi modern.

Grafik 2.3.4

IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja persentase Nilai SAKIP DP3APPKB Kota Tarakan dari tahun 2020 ke tahun 2022 selalu meningkat namun tahun 2023 sempat turun dan tahun 2024 meningkat lagi setelah adanya perbaikan pada sistem pengumpulan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan.

#### *2.3.3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2020 – 2024*

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selama tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

Tabel. 2.3.3.1  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
BELANJA OPERASI	5.037.044,58 7,00	5.331.179,6 96,00	6.918.860,6 79,00	6.731.197,6 88,00	7.659.396,2 50,00	3.759.433,2 85,00	4.727.368,8 74,00	5.431.662,4 54,00	6.143.332,4 31,00	6.990.199,0 88,00	74, 64	88, 67	78,51	91,2 7	91,2 6	11,67	3,51
Belanja Pegawai	3.610.498,27 8,00	3.561.001,5 85,00	3.582.639,9 78,00	3.567.039,9 78,00	3.716.214,9 78,00	3.169.327,7 23,00	3.432.945,4 30,00	3.161.761,8 17,00	3.264.185,5 35,00	3.602.828,3 83,00	87, 78	96, 40	88,25	91,5 1	96,9 5	0,75	184,0 3
Belanja Barang dan Jasa	916,74 6.309, 00	1.570.178,1 11,00	3.086.220,7 01,00	2.914.157,7 10,00	3.693.181,2 72,00	362.955,56 2,00	1.098.773,4 44,00	2.022.345,6 37,00	2.629.146,8 96,00	3.137.370,7 05,00	39, 59	69, 98	65,53	90,2 2	84,9 5	147,25	103,4 1
Belanja Hibah	509,80 0.000, 00	200.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,000 ,00	227.150,00 0,00	195.650,00 0,00	247.555,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	44, 56	97, 83	99,02	100, 00	100, 00	91,06	142,3 5
BELANJA MODAL	1.004.299,99 9,00	1.527.298,0 19,00	889.674,00 0,00	671.744,09 6,00	1.720.176,9 70,00	845.522,84 9,00	1.437.836,2 00,00	888.503,35 0,00	642.708,45 5,00	1.704.563,4 40,00	84, 19	94, 14	99,87	95,6 8	99,0 9	135,48	69,80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.004.299,99 9,00	240.698,01 9,00	0,00	671.744,09 6,00	1.642.884,9 10,00	845.522,84 9,00	219.994,50 0,00	0,00	642.708,45 5,00	1.627.278,0 00,00	84, 19	91, 40	#DIV /0!	95,6 8	99,0 5	67,13	69,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.286.600,0 00,00	889.674,00 0,00	0,00	77.292.060, 00	0,00	1.217.841,7 00,00	888.503,35 0,00	0,00	77.285.440, 00	0,0 0	94, 66	99,87	0,00	99,9 9	17,29	18,24
<b>TOTAL</b>	<b>6.041.344,58 6,00</b>	<b>6.858.477,7 15,00</b>	<b>7.808.534,6 79,00</b>	<b>7.402.941,7 84,00</b>	<b>9.379.573,2 20,00</b>	<b>4.604.956,1 34,00</b>	<b>6.165.205,0 74,00</b>	<b>6.320.165,8 04,00</b>	<b>6.786.040,8 86,00</b>	<b>8.694.762,5 28,00</b>	<b>76, 22</b>	<b>89, 89</b>	<b>80,94</b>	<b>91,6 7</b>	<b>92,7 0</b>	<b>52,57</b>	<b>117,9 7</b>

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

Tabel. 2.3.3.2

Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan Program Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	20 20	202 1	20 22	20 23	20 24	Angga ran	Reali sasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	33.088.000,00	214.986,233,00	250.000,00	264.981,730,00	263.842,640,00	22.664,00	208.474,560,00	247.555,00,00	262.742,700,00	263.053,800,00	68,50	96,97	99,02	99,16	99,70	142,90	27,70
PROGRAM PERLINDUNGAN AN PEREMPUAN	0,00	289.746,407,00	199.765,204,00	54.852,700,00	283.388,190,00	0,00	84.455,393,00	102.682,708,00	44.391,280,00	244.040,307,00	0,00	29,15	51,40	80,93	86,12	78,26	7,94
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	24.868,690,00	29.500,240,00	45.649,290,00	0,00	0,00	23.643,800,00	29.193,550,00	44.658,150,00	0,00	0,00	95,07	98,96	97,83	18,34	13,41
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	9.994.440,00	0,00	5.451.960,00	0,00	0,00	7.226.600,00	0,00	4.605.750,00	0,00	0,00	72,31	0,00	84,48	25,00	0,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	14.925,169,00	9.993.330,00	149.938,200,00	265.251,100,00	0,00	12.249,200,00	9.460.000,00	139.385,480,00	252.373,633,00	0,00	82,07	94,66	92,96	95,15	361,06	27,12

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	0,00	269.065,5 87,00	426.871,09 4,00	109.991,18 6,00	434.099,81 7,00	0,00	54.851,99 2,00	290.621,5 46,00	101.115,67 5,00	342.597,01 7,00	0,0 0	20,3 9	68, 08	91, 93	78, 92	69,77	8,95
PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	0,00	186.906,2 02,00	81.434.954 ,00	313.676,40 3,00	435.027,44 0,00	0,00	177.740,6 40,00	74.639,50 8,00	264.670,92 7,00	394.901,48 6,00	0,0 0	95,1 0	91, 66	84, 38	90, 78	66,86	8,34
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.449.606. 962,00	796.516,5 98,00	877.430,82 3,00	1.879.367. 792,00	2.825.152. 250,00	914.602,1 49,00	749.033,3 03,00	632.127,0 79,00	1.744.352. 565,00	2.600.603. 512,00	63, 09	94,0 4	72, 04	92, 82	92, 05	32,41	14,0 2
PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA(K S)	0,00	103.200,0 00,00	1.323.580. 000,00	948.088,10 1,00	862.951,45 0,00	0,00	103.200,0 00,00	768.666,0 00,00	744.155,27 1,00	754.472,92 1,00	0,0 0	100, 00	58, 07	78, 49	87, 43	286,3 0	21,1 6
PRAGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	16.744.000 ,00	0,00	0,00	0,00		16.002,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95, 57	0,00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEDLAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	124.911,04 0,00	0,00	0,00	0,00		85.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68, 61	0,00	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	56.163.078 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber : Laporan Keuangan DP3APPKB Kota Tarakan TA. 2020-2024

Dari tabel 2.3.3.1 di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 92,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

#### *2.3.4. Tantangan dan Peluang*

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- Minimnya Keterlibatan OPD dalam Analisis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (GAP dan GBS) berakibat capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) yang rendah.
- Kurangnya SDM terlatih yang kompeten di Pengarustamaan Gender (PUG) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan, serta evaluasi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Minimnya ruang bermain edukatif dan fasilitas ramah anak di tempat-tempat strategis
- Kurangnya sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan pengasuhan dan perkembangan anak.
- Proses legalisasi dokumen GPK melalui Peraturan Walikota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) belum tuntas.

- Masih terdapat sekolah ramah anak yang belum memenuhi target kinerja pada tahap paripurna.
- Rendahnya cakupan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di tingkat SMP.
- Kualitas pendataan keluarga belum optimal, sehingga memerlukan validasi dan verifikasi intensif.
- Minimnya pemanfaatan data RDK oleh stakeholder dan mitra kerja untuk perencanaan program.
- Cakupan verifikasi dan validasi data KRS belum memenuhi target akurasi. Proses pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana belum terdigitalisasi secara optimal.
- Pemanfaatan data hasil pendataan keluarga dan KRS untuk intervensi stunting belum maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan Kampung KB belum efektif, berdampak pada kualitas pelaporan dan capaian program.
- Ketersediaan data dan informasi akurat untuk pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas masih terbatas.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Komitmen dan sinergi stakeholder dalam mendukung Kampung KB belum optimal.
- Kebutuhan peningkatan kompetensi kader Ikatan Masyarakat Peduli (IMP) dalam implementasi program.
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan IMP dan lini lapangan.
- Peran stakeholder dalam pembinaan IMP dan lini lapangan belum terkoordinasi secara maksimal.
- Sebanyak 22 Faskes belum memiliki tenaga terlatih untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- Koordinasi dan komitmen pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting perlu diperkuat.
- Jumlah penyuluhan KB belum ideal, dengan rasio 1 penyuluhan per kelurahan yang belum tercapai.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah terlatih dan komitmen mengumpulkan Analisis Gender berupa GAP dan GBS
- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- Ketersediaan 22 Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mitra dan tenaga khusus KB MKJP menjadi peluang untuk optimalisasi akses kontrasepsi berkualitas, termasuk percepatan pencapaian target MKJP.
- Adanya fasilitasi pelayanan kontrasepsi mandiri bagi Pasangan Usia Subur (PUS) membuka peluang penguatan kemandirian masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi dengan swasta/CSR.
- Keberadaan Poktan Tribina, PIK-R, dan UPPKA menjadi basis penguatan program ketahanan keluarga berbasis komunitas, termasuk integrasi dengan isu stunting dan SDM unggul.
- Pembinaan PIK Remaja dan BKR yang telah berjalan dapat dikembangkan menjadi model intervensi holistik untuk pencegahan perkawinan anak, penyalahgunaan narkoba, dan kesehatan reproduksi remaja.
- Pelaksanaan 7 dimensi lansia tangguh di kelompok BKL menjadi peluang pengintegrasian layanan lanjut usia dengan sistem kesehatan daerah dan jaminan sosial.
- Adanya 3 penyuluhan KB per kecamatan memungkinkan penguatan sistem pendampingan keluarga melalui integrasi dengan kader desa dan teknologi informasi.
- Dokumen GDPK yang telah tersusun menjadi landasan perencanaan berbasis bukti untuk program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
- Pembinaan sekolah SSK (Sekolah Sehat dan Kreatif) dapat dikembangkan menjadi model integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum adaptif.
- Keberadaan Kampung KB di 20 kelurahan menjadi peluang replikasi model pembangunan keluarga terintegrasi (kesehatan, ekonomi, lingkungan).
- Bantuan alokasi dana dari DAK dan CSR

## 2.4. Kelompok Sasaran dan Mitra DP3APPKB

### 2.4.1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran layanan dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah segmentasi atau pengelompokan masyarakat yang menjadi target utama dalam pemberian layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan program keluarga berencana. Penentuan kelompok sasaran ini bersifat strategis untuk memastikan bahwa program dan layanan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

#### a) Kelompok Sasaran Pemberdayaan Perempuan

- Perempuan Usia Produktif

Kelompok sasaran utama dalam pemberdayaan perempuan adalah perempuan usia produktif yang mencakup berbagai kategori. Berdasarkan program yang dijalankan Kementerian PPPA, terdapat fokus khusus pada tiga kelompok perempuan dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyintas bencana dan tindak kekerasan

- Organisasi Perempuan

Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari tingkat Kota hingga nasional, seperti GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan DWP (Dharma Wanita Persatuan) menjadi sasaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

#### b) Kelompok Sasaran Perlindungan Anak

- Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, terdapat 15 hingga 20 kategori anak yang memerlukan khusus, antara lain :

- a. Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak korban penyalahgunaan narkoba
- f. Anak korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
  - j. Anak korban kejahatan seksual
  - k. Anak korban jaringan terorisme
  - l. Anak penyandang disabilitas
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
  - o. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya
  - Anak Usia Sekolah Kelompok sasaran ini mencakup anak usia 13-17 tahun yang berpotensi mengalami kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus.
  - Anak dalam Lembaga Layanan Anak-anak yang berada dalam berbagai lembaga penyedia layanan ramah anak, termasuk satuan pendidikan, lembaga rehabilitasi, dan lembaga penanganan anak berhadapan dengan hukum
- c) Kelompok Sasaran Program Keluarga Berencana
- Pasangan Usia Subur (PUS)  
Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan kelompok sasaran utama program KB, didefinisikan sebagai pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid BKKBN menyarankan usia 21 hingga 35 tahun sebagai waktu ideal untuk menikah dan hamil, karena pada usia tersebut pasangan telah siap secara fisik maupun mental
  - Kelompok Sasaran Berdasarkan Status KB
    - a. PUS Peserta KB Aktif - pasangan yang sedang menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern
    - b. PUS Bukan Peserta KB - pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi
    - c. PUS dengan Unmet Need - pasangan yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi kebutuhannya
  - Sasaran Khusus Program KB Program KB juga menargetkan kelompok khusus seperti:
    - a. Remaja dan generasi muda melalui program Generasi Berencana (GenRe)
    - b. Laki-laki melalui program peningkatan kesertaan KB pria
    - c. Masyarakat di wilayah khusus yang memerlukan pendekatan dan strategi khusus
- d) Kelompok Sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Masyarakat Usia Reproduksi

Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam program pengendalian kuantitas penduduk, dengan fokus pada pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

- Keluarga Berkualitas

Program pengendalian menargetkan berkualitas terbentuknya yang tidak penduduk keluarga hanya mempertimbangkan jumlah anak, tetapi juga kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga termasuk lansia.

#### *2.4.2. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Tarakan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Proses bisnis perangkat daerah ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup organisasi perangkat daerah internal, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat.

Kemitraan pada Internal Organisasi Perangkat Daerah menjadi tulang punggung dalam implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemitraan ini melibatkan BappedaLitbang, BPKPAD, dan Inspektorat dalam program pengarusutamaan gender, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Disnas Pendidikan, DinsosPM, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat (penurunan stunting). Koordinasi yang intensif juga dilakukan dengan Camat dan Lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kemitraan dengan Instansi Vertikal Nasional melibatkan Kementerian PPPA dalam program perlindungan khusus anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berperan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga. BNN, Departemen Agama, RSUD Tarakan dan Polres mendukung program perlindungan khusus anak dan perempuan melalui koordinasi dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan intervensi khusus.

Tabel. 2.4.2.1  
Mitra dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Ramah Anak di PUSKESMAS	Meningkatkan layanan Sarana Prasarana PUSKESMAS Ramah Anak
2.	Disdikbud	Pelayanan Ramah Anak di Sekolah (pemenuhan dan perlindungan hak anak)	Meningkatkan layanan Sekolah Ramah Anak
3.	Kementrian Agama	Pelayanan Ramah Anak di Sekolah (pemenuhan dan perlindungan hak anak)	Meningkatkan layanan Sekolah Ramah Anak
4.	TPPKSP (Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatkan Kapasitas SDM Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
7.	Dinas Kesehatan, BKKBN, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan	Sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi	Meningkatkan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat dalam Kependudukan, KB dan Penurunan Stunting
8.	Bappeda, BPKPAD, dan Inspektorat	Motor penggerak ARG	Meningkatkan program pengarusutamaan gender
9.	DinsosPM, Satpol PP, Dinkes	Pelayanan Perlindungan dan Pendampingan Anak dan Perempuan	Meningkatnya perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan
10.	Dinkes, DPUPR, DLH, DinsosPM, Disdik	Penurunan stunting	Menurunkan stunting
11.	Equator TV	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
12.	Tarakan TV	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
13.	RRI Kota Tarakan	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
14.	PKBH Universitas Borneo	Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan	Layanan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
15.	HIMPSI (Himpunan Psikologi)	Layanan pendampingan psikologis korban	Pemulihan dan Rehabilitasi bagi Korban kekerasan
16.	POLRI	Pendampingan Penanganan secara Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan	Layanan penjangkauan kasus
17.	RSUD Tarakan	Pendampingan dari segi medis	Layanan medikolegal bagi korban kekerasan perempuan dan anak
18.	PT. Telkom	Penyediaan paket data buat kader	Penurunan stunting
19.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan KB pada masyarakat (MKJP)	Peningkatan akseptor KB

20.	Bunda Paud	Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak
-----	------------	--	--

Keseluruhan kemitraan ini dijalankan berdasarkan MOU, PKS, dan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, dengan mayoritas program telah berjalan mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.

## 2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tarakan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

### *2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan*

Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

#### 1. Rendahnya Kualitas Keluarga;

dan dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2.5.1.1

Rumusan Masalah Rendahnya Kualitas Keluarga  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan inklusi sosial dan kesetaraan gender	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Lemahnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.
	Belum optimalnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Kurangnya sumberdaya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
		Belum terpenuhinya hak anak di Kota Tarakan
		Masih rendahnya partisipasi lembaga penyedia layanan (puspa dan puspaga)
	Rendahnya kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya pemutakhiran data keluarga
		Tingginya angka unmetneed
		Belum optimalnya peran kader dalam pembangunan keluarga

### 2.5.2. Telaah Dokumen Lainnya

#### A. Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 secara eksplisit mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian integral dari transformasi sosial-ekonomi. Untuk urusan pemberdayaan perempuan, dengan target SDG 5 tentang kesetaraan gender melalui penguatan peran perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, isu pengendalian penduduk merujuk pada SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan). khususnya dalam konteks mengoptimalkan bonus demografi melalui program keluarga berencana yang terintegrasi

Sebagai dasar hukum penyusunan Renstra OPD, RPJMN 2025-2029 mengamanatkan tiga prinsip utama:

1. **Koherensi Vertikal** antara prioritas nasional dan program daerah.
2. **Responsivitas Gender** dalam alokasi anggaran dan layanan publik, serta.
3. **Integrasi Data Kependudukan** dalam perencanaan spasial

OPD terkait harus melakukan disagregasi data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status perkawinan untuk memastikan ketepatan intervensi. Misalnya, analisis data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Gender (SIPBM) dapat mengidentifikasi kantong kemiskinan perempuan kepala keluarga yang memerlukan program pemberdayaan ekonomi spesifik.

RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi empat isu kritis dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

1. Maraknya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
2. Rendahnya Representasi Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan
3. Tingginya Angka Perkawinan Anak
4. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi.

Selanjutnya, tantangan utama dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Stagnasi Partisipasi Pria dalam KB (hanya 4,3% pengguna kontrasepsi pria),
2. Peningkatan Angka Perceraian yang berdampak pada Ketahanan Keluarga, Serta
3. Disparitas Angka Unmet Need KB antar wilayah (12% di perkotaan vs 18% di pedesaan)

Renstra OPD perlu merancang program yang mengadopsi pendekatan **3C** yaitu: *Coordination* (sinergi lintas sektor), *Capacity* (penguatan kelembagaan), dan *Community* (pemberdayaan berbasis masyarakat).

Renstra OPD juga perlu mengembangkan sistem informasi geografis (SIG) yang memetakan daerah dengan angka stunting tinggi, TFR tinggi, dan cakupan KB rendah. Selain itu, pelibatan organisasi keagamaan dan tokoh adat dalam sosialisasi KB menjadi kunci keberhasilan program di daerah konservatif.

**B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tarakan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Tarakan pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Bontang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Tarakan baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, Vvisi Kota Tarakan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA CERDAS YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA PERDAGANGAN, PERIKANAN, KELAUTAN DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah "**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**"

Tabel. 2.5.2.1  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2025-2029 Kota Tarakan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
Tujuan 1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Sasaran 3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks ketimpangan gender dan Indeks

					pembangunan keluarga
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks RB	Sasaran 10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja terus meningkat  Indikator : Nilai SAKIP

### C. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 beserta sasaran program dan indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- SP 1.1. Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pelembagaan PUG di K/L dan pemda.
- SP 1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik.
- SP 1.3. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak.
- SP 1.4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak.
- SP 1.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- SP1.6. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
- SP 1.7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan

korban kekerasan termasuk TPPO.

- SP 1.8. Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus

**2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- SP 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

**D. Telaah Renstra Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN  
2025-2029**

Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN Program yang dilaksanakan oleh Kemendukbangga tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”
2. Program Dukungan Manajemen Kemendukbangga memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemendukbangga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.



Tabel. 2.5.2.2

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025-2029 Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Tingginya komitmen daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak	Rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir;	SDG 5.2: 0 kasus kekerasan per 10.000 penduduk pada 2030 SDG 5.3: 0% perkawinan anak pada 2030	< 5 kasus per 10.000 penduduk per tahun (RPJMN 2024) < 8,74% (2024), < 6% (2030)	< 10% (2029)	Peningkatan kesetaraan gender dan kualitas keluarga
Komitmen daerah pada kesetaraan gender	Rendahnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga		SDG 5.5: 50% perempuan di parlemen	30% perempuan di DPR/DPRD (RPJMN)	30% perempuan di DPRD Provinsi (2029)	
Pengendalian penduduk dan pengelolaan lingkungan	Belum tercipta Kesejahteraan Keluarga	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat;	SDG 3.2: < 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030	< 16 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMN 2024)	< 10 per 1.000 kelahiran hidup (2029)	
Ketersediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi			SDG 3.7: Unmet need KB < 5% pada 2030	Unmet need KB < 7% (RPJMN 2024)	Unmet need KB < 8% (2029)	

Program gizi dan kesehatan anak			SDG 2.2: Prevalensi stunting < 20% pada 2025, < 14% pada 2030	< 14% pada 2024 (RPJMN), < 7% pada 2030	< 14% pada 2029	
Sistem data terpadu dan Pengalokasian anggaran spesifik			SDG 17.18: 100% data terpilah gender, usia, dsb pada 2030	100% sistem data terpilah di seluruh provinsi (RPJMN)	100% sistem data terpilah di seluruh kabupaten/kota (2029)	

### *III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*



### **3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan**

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Tarakan berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.**

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**
- 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal**
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota**

**5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana**

Berdasarkan pada lima Misi di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan melaksanakan misi pertama yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota yang diterjemahkan dalam pencapaian dan penyelarasan tujuan dan sasaran RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah pada tujuan pertama yaitu meningkatnya sumber daya manusia dan tujuan keempat yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

**3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**TUJUAN : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga**

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

**SASARAN :**

- 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
- 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga**
- 3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga**
- 4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Tabel. 3.1.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</b>	<b>Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga</b>		<b>IK.T.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</b>	INDEKS	0,352	0,351	0,35	0,34	0,332	0,331	0,3	Pengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja
			S.1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IK.S.1.1 Indeks Pembangunan Gender	INDEKS	92,79	92,8	93	93,5	94	94,5	95
			S.1.2 Indeks Pemberdayaan Gender	INDEKS	68,54	68,6	68,8	69	69,5	69,64	69,74	Pengukur sejauh mana peran aktif perempuan
			<b>IK.T.2. Predikat Kota Layak Anak</b>		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Predikat yang menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
		S.2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	IK.S2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	Persentase	0,00026	0,00025	0,00024	0,00023	0,00022	0,00021	0,0002	Proporsi perempuan berusia 15-64 tahun yg mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

		IK.S2.2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	Persentase	0,00098	0,00097	0,00096	0,00095	0,00094	0,00093	0,00092	Proporsi anak yg mengalami kekerasan paling tidak salah satu atau lebih tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikis yg dialami oleh anak setidaknya satu bentuk kekerasan
		IK.T.3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	INDEKS	66,67	66,9	67,12	67,35	67,68	68,68	69,68	Pengukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga fungsi keluarga
		S.3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga	IK.S.3.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,16	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19
			IK.S3.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	60,4	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

		S.4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IK.S.4.1. Nilai SAKIP	Angka	85,87	85,9	86	86,5	87	87,5	88	Penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.
			IK.S4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS	88,74	88,74	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	Pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

#### ***3.2.1. Strategi***

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2.1.1

Tahapan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kelembagaan dan sinergi program dengan lintas sektor dan stakeholder terkait	Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga	Penguatan basis data melalui pemutakhiran serta pengolahan data dan penanganan serta pendampingan kasus secara tepat sasaran	Pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui program dan bantuan berbasis komunitas	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keluarga yang Berkualitas

Tahapan strategis 2026-2030 yang tertuang dalam tabel di atas memerlukan penjabaran operasional berbasis lokasi spesifik. Oleh karena itu, ditetapkan lokus prioritas per tahap yang menjadi fokus implementasi, dengan narasi yang mengonversi kerangka strategis menjadi aksi terukur. Penentuan lokus mempertimbangkan kompleksitas isu, urgensi layanan, dan prinsip pemerataan, sehingga setiap tahap membangun fondasi untuk tahap berikutnya secara berjenjang.

**a. Tahap I (2026)**

Fokus pada penguatan kelembagaan dan sinergi program dengan lintas sektor dan *stakeholder* terkait. Target: terbentuknya kelembagaan yang kuat dan sinergi program dengan lintas sektor serta *stakeholder* sehingga meningkatnya partisipasi.

**b. Tahap II (2027)**

Fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga. Target: SDM terlatih meningkat sebanyak 30%.

**c. Tahap III (2028)**

Fokus pada penguatan basis data melalui pemutakhiran serta pengolahan data dan penanganan serta pendampingan kasus secara tepat sasaran. Target: data yang tersedia akurat serta penurunan kasus sebesar 5%.

**d. Tahap IV (2029)**

Fokus pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui program dan bantuan berbasis komunitas. Target: peningkatan 25% kemitraan dengan institusi swasta/LSM.

**e. Tahap V (2030)**

Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas. Target: partisipasi perempuan/anak naik 400% dalam forum perencanaan daerah, dan sistem evaluasi berkelanjutan.

**3.2.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel. 3.2.2.1  
Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Mendorong Keterlibatan Perempuan dan Kelompok Rentan	Penguatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	
			Penguatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	

		Penyediaan media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
		Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	
		Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
		Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
		Peningkatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	
		Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
		Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
		Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	
		Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Penguatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

*IV. PROGRAM,  
KEGIATAN DAN  
KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN*



## 4. Program, Kegiatan dan Kinerja Bidang Urusan

### 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025 - 2029.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan, maka perlu dirumuskan, Tujuan perumusan Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan adalah merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan yang efektif, efisien, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perumusan ini membantu penentuan prioritas, alokasi sumber daya, dan pemantauan kemajuan. Perumusan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.1

Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya kesetaraan gender dan Kualitas Keluarga				<b>IK. T.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</b>		
	<b>S.1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</b>			<b>IK.S.1.1. Indeks Pembangunan Gender</b>		
		<b>OC.1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan</b>		<b>Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
			<b>Terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	

			Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i><b>IK.S.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender</b></i>		
			<i><b>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></i>	<i><b>Jumlah lembaga yang dibina</b></i>	<i><b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></i>
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2026
		<b>OC.2. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak</b>		<b>Percentase PUSPAGA yang Aktif</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
			<i><b>Tersedianya media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</b></i>	<i><b>Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</b></i>	<i><b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></i>

			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2026
			Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Perlindungan Anak</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	

				Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		<b>OC.3. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak</b>		<b>Percentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	2026
				Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2026
	<b>S.2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga</b>			<b>IK. S.2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)</b>		

		<b>OC.4. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan</b>		<b>Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026

			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	

					Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>IK. T.2. Predikat Kota Layak Anak</b>		
				<b>IK. S2.2. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)</b>		
	OC.5. Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup</i>	<i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>

<i>Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026	
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026	

				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
		<b>OC.6. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</b>		<b>1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2026

			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA Tingkat Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026

			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban	2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>

		<i>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten		
				Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		
				Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	2026	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2026	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026	

				Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				<b>IK. T3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>		
	<b>S.3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>IK. S.3.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun</b>		
				<b>IK.S.3.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)</b>		

		OC.7. Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		1. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			<i>Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen data keluarga</i>	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
		OC.8. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		1. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi ( Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

		<i>Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah tenaga penyuluhan KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
		<i>Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan KB</i>	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
		<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	

		<i>Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
	<b>OC.9. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
		<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
			Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>

			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
	<i>S.4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>			<i>IK. S.4.1. Nilai SAKIP</i>	
	<b>OC. 10.</b> <b>Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja</b>		<b>Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
		<i>Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP</b>	<b>Laporan keuangan SKPD</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				<b>IK. S.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		
			<b>Terlaksananya administrasi kepegawaian</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		<b>OC. 11. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan</b>		<b>2. Indeks Layanan Kesekretariatan</b>		
			<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

		Tersedianya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Tersedianya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		<b><i>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i></b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		<b><i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i></b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		<b><i>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i></b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Perumusan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pendanaan. Kerangka pendanaan merupakan instrumen strategis dalam mengelola perencanaan anggaran perangkat daerah secara efektif dalam jangka menengah. Melalui kerangka ini, perangkat daerah memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia dialokasikan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menjalankan prioritas pembangunan daerah. Kerangka pendanaan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, menentukan skala prioritas belanja daerah, serta mengantisipasi tantangan fiskal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

Rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun untuk lima tahun ke depan seperti yang disajikan pada tabel 4.1.2 dibawah ini. Adapun pagu pendanaan merupakan angka sementara dan masih dapat berubah setelah melalui proses evaluasi dan penetapan lebih lanjut.

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

Tabel 4.1.2.

Rencana Pendanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.511.963.820 ,00		5.450.104.620 ,00		5.450.104.620 ,00		5.450.104.620 ,00		5.465.104.620 ,00				
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.233.891.043 ,00		4.187.034.843 ,00		4.187.034.843 ,00		4.187.034.843 ,00		4.187.034.843 ,00				
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	499.960.022,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	2.08.2.14.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	5.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

2.08.01.2.05.000 1 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	5.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				132.608.220,00		142.052.020,00		142.052.020,00		142.052.020,00		142.052.020,00	
Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	132.608.220,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	2.08.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

an Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
2.08.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.628.720,00		27.072.520,00		27.072.520,00		27.072.520,00		27.072.520,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	27.628.720,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00				
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00				
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00				
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				213.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00				
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5	213.721.650,00	4	174.721.650,00	4	174.721.650,00	8	174.721.650,00	8	174.721.650,00				

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3			
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.943.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	140.943.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.777.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5	72.777.850,00	4	44.277.850,00	4	44.277.850,00	8	44.277.850,00	8	44.277.850,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1											
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.931.218,00		75.931.218,00		75.931.218,00		75.931.218,00		75.931.218,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		

Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	70.398.934,00	11	58.398.934,00	11	58.398.934,00	11	58.398.934,00	11	58.398.934,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14		14		14		14		14					
2.08.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00				

2.08.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	60.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00	
2.08.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	
Meningkatnya pengukuran internal akuntabilitas kinerja	Percentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	0	1		1		1		1		1		

	Daerah (Dokumen)													
2.08.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.000 8 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.726.931.021,00		3.726.931.021,00		3.726.931.021,00		3.726.931.021,00		3.726.931.021,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	34		34		34		34		34			
2.08.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00				
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00				
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00				
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10	11	124.832.000,00	12	124.832.000,00	13	124.832.000,00	14	124.832.000,00	15	124.832.000,00	2.08.2.14.00.01.000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00				
Terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	60	47.832.000,00	60	47.832.000,00	60	47.832.000,00	60	47.832.000,00	60	47.832.000,00				
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	0	30		30		30		30		30					

	pemerintah) (Lembaga)													
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	30	25.332.000,00	30	25.332.000,00	30	25.332.000,00	30	25.332.000,00	30	25.332.000,00		
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan				77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00				
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00				
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00				
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	30		40		40		50		50			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	30	60.014.320,00	40	60.014.320,00	40	60.014.320,00	50	60.014.320,00	50	60.014.320,00				
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00				
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan	0	2	199.806.370,00	2	199.806.370,00	2	199.806.370,00	2	199.806.370,00	2	199.806.370,00				

Kewenangan Kabupaten/Kota	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	3		3		3		3		3		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	40		40		40		40		40		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15		20		25		30		30		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	0	15		20		25		30		30		

	Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)													
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00				

Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15	41.400.000,00	20	41.400.000,00	25	41.400.000,00	30	41.400.000,00	30	41.400.000,00		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	0	15	17.124.600,00	20	17.124.600,00	25	17.124.600,00	30	17.124.600,00	30	17.124.600,00		

	Kabupaten/Kota (orang)														
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00			
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	3	14.500.000,00	3	14.500.000,00	3	14.500.000,00	3	14.500.000,00	3	14.500.000,00			
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00			
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PUSPAGA yang Aktif (%)	25	25	45.463.680,00	50	45.463.680,00	75	45.463.680,00	100	45.463.680,00	100	45.463.680,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan	0	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00				

	sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	17.145.300,00	1	17.145.300,00	1	17.145.300,00	1	17.145.300,00	1	17.145.300,00		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan	0	1		1		1		1		1			

	pendampingan (Lembaga)												
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00				
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00				
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00				
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00				
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00				
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00				

Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00	2	15.440.000,00		
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00		
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00				
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00				
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00				
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00				
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00				
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00				
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan	0	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00				

Lingkup Kabupaten/Kota	masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				5.454.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak (%)	0	100	5.454.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.454.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		5.454.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		
	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simponi PPA (Dokumen)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	17		17		17		17		17			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00				
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00				
2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				2.934.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00				
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni	0	1	2.934.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00				

	PPA (Dokumen)												
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Penilaian Mandiri Evaluasi KLA (Skor)	854,56	855	416.000.000,00	860	416.000.000,00	870	416.000.000,00	880	416.000.000,00	890	416.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00	
Terlaksananya Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	
	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		150		150		150		150		

Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30		30		30		30		30					
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00				

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00	
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	

Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)												
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00				
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00				
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	0	50	323.000.000,00	50	323.000.000,00	50	323.000.000,00	50	323.000.000,00	50	323.000.000,00				

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)											
	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	2		2		2		2		2	
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2		2		2		2		2	
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15		20		25		30		35	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2		2		2		2		2	
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				301.500.000,00		301.500.000,00		301.500.000,00		301.500.000,00		301.500.000,00	
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15	301.500.000,00	20	301.500.000,00	25	301.500.000,00	30	301.500.000,00	35	301.500.000,00	
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00				

	(lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)													
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				416.502.007,00		401.502.007,00		401.502.007,00		401.502.007,00		416.502.007,00		

Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Percentase)	100	100	416.502.007,00	100	401.502.007,00	100	401.502.007,00	100	401.502.007,00	100	416.502.007,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				97.100.000,00		82.100.000,00		82.100.000,00		82.100.000,00		97.100.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan Kta Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	15	97.100.000,00	20	82.100.000,00	25	82.100.000,00	30	82.100.000,00	35	97.100.000,00		
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan Kta Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah kebijakan pencegahan Kta (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0	1		0		0		0		1			
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan Kta Kewenangan	0	2		2		2		2		2			

	Kab/Kota (Laporan)												
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	4		4		4		4		4					
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00				
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00				
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00				

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota (Kegiatan)	0	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00		
2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	15	1.500.000,00	20	1.500.000,00	25	1.500.000,00	30	1.500.000,00	35	1.500.000,00		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD)	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD)	0	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00		

Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)												
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				246.172.597,00		246.172.597,00		246.172.597,00		246.172.597,00		246.172.597,00	
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	47	246.172.597,00	50	246.172.597,00	51	246.172.597,00	52	246.172.597,00	53	246.172.597,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		3		4		4		5					
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5					

	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		3		4		4		5		
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23		25		27		28		29		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		6		6		7		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23		25		27		28		29		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23	23.500.000,00	25	23.500.000,00	27	23.500.000,00	28	23.500.000,00	29	23.500.000,00	
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan	0	23	40.400.000,00	25	40.400.000,00	27	40.400.000,00	28	40.400.000,00	29	40.400.000,00	

Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	47	78.939.000,00	50	78.939.000,00	51	78.939.000,00	52	78.939.000,00	53	78.939.000,00		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	7	1.500.000,00				
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00				
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi	0	3	54.083.597,00	3	54.083.597,00	4	54.083.597,00	4	54.083.597,00	5	54.083.597,00				

	Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	5	3.000.000,00		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	50	50	73.229.410,00	50	73.229.410,00	50	73.229.410,00	50	73.229.410,00	50	73.229.410,00		

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)												
	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	17	20		20		25		25		25		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	5		6		7		8		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	17	20		20		25		25		25					

	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	8	10		12		15		18		20		
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	8	10	10.000.000,00	12	10.000.000,00	15	10.000.000,00	18	10.000.000,00	20	10.000.000,00	
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00	
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	5	15.000.000,00	6	18.000.000,00	7	20.000.000,00	8	22.000.000,00	10	25.000.000,00	
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat	17	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	25	8.000.000,00	25	8.000.000,00	25	8.000.000,00	

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)													
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22.290.440,00		19.290.440,00		14.290.440,00		12.290.440,00		9.290.440,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	50	22.290.440,00	50	19.290.440,00	50	14.290.440,00	50	12.290.440,00	50	9.290.440,00		
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan	17	20	20.938.970,00	20	20.938.970,00	25	20.938.970,00	25	20.938.970,00	25	20.938.970,00				

	pendampingan (Lembaga)												
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				766.048.300,00		766.048.300,00		766.048.300,00		766.048.300,00		766.048.300,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase keluarga yang terdata (%)	84,97	86,00	127.499.700,00	87,00	127.499.700,00	88,00	127.499.700,00	89,00	127.499.700,00	90,00	127.499.700,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUUS 15-19 tahun)	26	25		24		23		22		21		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00		127.499.700,00	
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1		127.499.700,00	1	127.499.700,00	1	127.499.700,00	1	127.499.700,00	1	127.499.700,00	

	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				43.649.800,00		43.649.800,00		43.649.800,00		43.649.800,00		43.649.800,00	
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	43.649.800,00	1	43.649.800,00	1	43.649.800,00	1	43.649.800,00	1	43.649.800,00	
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				34.032.300,00		34.032.300,00		34.032.300,00		34.032.300,00		34.032.300,00	
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1	34.032.300,00	1	34.032.300,00	1	34.032.300,00	1	34.032.300,00	1	34.032.300,00	
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				24.817.600,00		24.817.600,00		24.817.600,00		24.817.600,00		24.817.600,00				
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellau Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	1		24.817.600,00	1	24.817.600,00	1	24.817.600,00	1	24.817.600,00	1	24.817.600,00				
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				400.632.350,00		400.632.350,00		400.632.350,00		400.632.350,00		400.632.350,00				
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	Percentase masyarakat terpapar program Bangga Kencana (%)	60,40	61,15	400.632.350,00	61,50	400.632.350,00	62,15	400.632.350,00	62,50	400.632.350,00	63,00	400.632.350,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	14,60	13,60		13,00		12,60		12,00		11,60					
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan				149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00				

Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	149.000.000,00	1	149.000.000,00	1	149.000.000,00	1	149.000.000,00	1	149.000.000,00		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				82.200.000,00		82.200.000,00		82.200.000,00		82.200.000,00		82.200.000,00				
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1	82.200.000,00	1	82.200.000,00	1	82.200.000,00	1	82.200.000,00	1	82.200.000,00				
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				

Terkelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00		

2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20	24.000.000,00	20	24.000.000,00	20	24.000.000,00	20	24.000.000,00	20	24.000.000,00				
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00				

Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	80	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	80	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00	80	4.000.000,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	144	593		593		593		593		593			

	Jangka Panjang (MKJP) (Orang)													
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	1		1		1		1		1		1	
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	144	593	50.000.000,00	593	50.000.000,00	593	50.000.000,00	593	50.000.000,00	593	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00				
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00				
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tersusuk Jaringan dan Jejaringnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tersusuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tersusuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00				
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				37.632.350,00		37.632.350,00		37.632.350,00		37.632.350,00		37.632.350,00				
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/K	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	20	20	37.632.350,00	20	37.632.350,00	20	37.632.350,00	20	37.632.350,00	20	37.632.350,00				

ota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)												
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	20	20	17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	0	17.632.350,0	
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				20.000.000,0	0	20.000.000,0	0	20.000.000,0	0	20.000.000,0	0	20.000.000,0	
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1	1	20.000.000,0	0	1	20.000.000,0	0	1	20.000.000,0	0	1	20.000.000,0

2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				237.916.250, 00										
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Percentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina (%)	100	100	237.916.250, 00	2.08.2.14.0.00.01.0 000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				232.640.030,00		232.640.030,00		232.640.030,00		232.640.030,00		232.640.030,00				
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2	2	232.640.030,00	2	232.640.030,00	2	232.640.030,00	2	232.640.030,00	2	232.640.030,00				
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	4		4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1	1		1		1		1		1					

	Keluarga/UPPKS) (Laporan)												
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	30	30		30		30		30		30		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				20.565.030,00		20.565.030,00		20.565.030,00		20.565.030,00			
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	20.565.030,00	1	20.565.030,00	1	20.565.030,00	1	20.565.030,00	1	20.565.030,00	
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00				
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				182.575.000,00		182.575.000,00		182.575.000,00		182.575.000,00		182.575.000,00				
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	30	30	182.575.000,00	30	182.575.000,00	30	182.575.000,00	30	182.575.000,00	30	182.575.000,00				
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan				9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00				

Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				5.276.220,00		5.276.220,00		5.276.220,00		5.276.220,00		5.276.220,00	
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1	1	5.276.220,00	1	5.276.220,00	1	5.276.220,00	1	5.276.220,00	1	5.276.220,00	

Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1		1		1		1		1		1	
---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4.276.220,00		4.276.220,00		4.276.220,00		4.276.220,00		4.276.220,00				

Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1	1	4.276.220,00	1	4.276.220,00	1	4.276.220,00	1	4.276.220,00	1	4.276.220,00
--	---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Berdasarkan Kerangka Pendanaan tersebut, telah ditetapkan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program strategis yang dirancang oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan evaluasi kinerja. Adapun program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan sarana mewujudkan pembangunan daerah terarah dan berkelanjutan. Khususnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program prioritas yang dijabarkan langsung ke dalam sub-kegiatan meliputi:

Tabel 4.1.3.

Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Daerah  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	

			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0003 - &layanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03.0004 - layanan Konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
4.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.08.05.2.01.0003 - Penyedian, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
5.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

			2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

			2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihian korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguanan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguanan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguanan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguanan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
8.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKPK	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
9.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

		2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
		2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
		2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur

kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

#### **4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator tujuan daerah (impact) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator sasaran. Target IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan pada tabel berikut :

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

Tabel 4.2.1.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-1	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tujuan									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0.352	0.351	0.35	0.34	0.332	0.331	0.3	
2.	Predikat Kota Layak Anak		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	66.67	66.9	67.12	67.35	67.68	68.68	69.68	
	Sasaran									
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92.79	92.8	93	93.5	94	94.5	95	
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68.54	68.6	68.8	69	69.5	69.64	69.74	
3.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	persentase	0.00026	0.00025	0.00024	0.00023	0.00022	0.00021	0.0002	
4.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	persentase	0.00098	0.00097	0.00096	0.00095	0.00094	0.00093	0.00092	
5.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.16	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	
6.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	persentase	60.4	62	62.5	62.8	63	63.3	63.5	
7.	Nilai SAKIP	angka	85.87	85.9	86	86.5	87	87.5	88	

8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.74	88.74	88.75	88.76	88.77	88.78	88.79	
----	----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

#### **4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Utama (IKK) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2.1  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK**

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPM = \sqrt[3]{(I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Pengeluaran}})} \times 100$ $IPG = \frac{(IPM \text{ Perempuan})}{(IPM \text{ Laki-laki})} \times 100$ <p> <math>I_{\text{Kesehatan}}</math> = Umur Harapan Hidup Saat Lahir  <math>I_{\text{Pendidikan}}</math> = Pengabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)  <math>I_{\text{Pengeluaran}}</math> = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan  IPM = Indeks Pembangunan Manusia  IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan  IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki  IPG = Indeks Pembangunan Gender </p>	Indeks	92	92,8	93	93,5	94	94,5	95

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	$IKG = 1 - \frac{HARM(GF, GM)}{GF, M}$ <p>Keterangan:</p> <p>HARM (GF, GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan</p> $GF, M = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \cdot \text{Pemberdayaan} \cdot \text{IPK}}$ <p>GF, M : Indeks dimensi</p> <p>Rumus Indeks Kesehatan adalah:</p> $\text{Kesehatan} = \frac{\sqrt[0.01]{f_{\text{askes.ulp}}}}{2}$ <p>Rumus Indeks pemberdayaan adalah:</p> $\text{Pemberdayaan} = (\sqrt{PRF.SF} + PRM.SM)/2$ <p>Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah</p> $IPK = (TPAK_F + TPAK_M)/2$ <p>Dimana:</p> <p>Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi</p> <p>Pemberdayaan: indeks pemberdayaan</p>	Indeks	0,352	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		<p>IPK : Indeks Pasar Kerja</p> <p>Indeks Perempuan dihitung dengan formula:</p> $GF = \sqrt{\left(\frac{0,01}{faskes}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PRF \cdot SF) \cdot TAPKF}$ <p>formula untuk Indeks Laki-laki:</p> $GM = \sqrt[3]{1 \cdot (PRM \cdot SEM)^{1/2} \cdot TAPKM}$ <p>Keterangan</p> <p><math>G_F</math>: Indeks Perempuan</p> <p><math>G_M</math>: Indeks Laki-laki</p> <p>Faskes: Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan</p> <p>ULP: Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</p> <p><math>PR_F</math>: Persentase perempuan yang duduk di parlemen</p> <p><math>PR_M</math>: Persentase perempuan yang duduk di parlemen</p>								

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		$SE_F$ : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA $SE_M$ : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA $TPAK_F$ : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen $TPAK_M$ : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja								
3	Persentase ARG Daerah	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG	%	10	10,5	11	12	13	14	15
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif $\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$  Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara;	%	100	100	100	100	100	100	

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		e. Mediasi; dan  f. Pendampingan korban.								
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif $\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$		100	100	100	100	100	100	100

**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capai an 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Total Fertility Rate(TFR) Kabupaten/Kota}}{\text{Target Fertility Rate (TFR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	2,16	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	$\frac{\text{Banyaknya Peserta KB aktif modern}}{\text{Banyaknya pasangan usia subur (PUS)}} \times 100\%$  PA Modern : Peserta KB Aktif modern  PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	60,4	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	14,6	14	13,6	13	12,6	12	11,6

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capai an 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\text{ASFR}_x = \frac{P_x}{P_{fx}} \times 1000$ <p>ASFR<sub>x</sub> = umur Perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan (misal: 15-19; 20-24; dst)</p> <p>P<sub>x</sub> = jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur x</p> <p>P<sub>fx</sub> = jumlah Perempuan kelompok umur x</p>	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 tahun	26	25,5	25	24	23	22	21
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu:</p> <p>(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga;</p> <p>(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;</p> <p>(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial</p> <p>Formula iBangga:</p> $i\text{Bangga} = 1/3 (\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}) \times 100$	Nilai 0-100	65.45	66,6 9	67.1 2	67.3 5	67.6 8	68.6 8	69.6 8



## V. PENUTUP



## 5. Penutup

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Tarakan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERIODE TA 2025-2029**

---

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara optimal dan terpadu. Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Tarakan.

Tarakan, 20 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasman Parigi, S.E., M.M  
Pembina Tingkat I / VI b  
NIP. 19720822 2010011 001

---

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

